



Reformasi Gaya Kepemimpinan Formal dalam Pemerintahan di Kabupaten Mamberamo Tengah

Wim Wanimbo*, Simon Abdi K. Frank

Program Doktor Ilmu Sosial, Program Pascasarjana, Universitas Cenderawasih
Email Korespondensi: sergiotimothy73@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Reformation, formal leadership, Toxic, Publik Service, Good Governance

How to Cite:

Wanimbo W., Frank S.A.K. (2023). Reformasi Gaya Kepemimpinan Formal Dalam Pemerintahan di Kabupaten Mamberamo Tengah. Jurnal Ekologi Birokrasi, 11 (2): 112 - 121.

DOI:

10.31957/jeb.v11i2.3265

ABSTRACT

This article is the result of research on reformation of format leadership style in Mamberamo Tengah regency. The main problem of this research is to know how the formal leadership in this context (regent) and how the public service practice with base on "good governance" principle in development for Mamberamo Tengah's community. This research used descriptive qualitative approach. The data were collected by field observation, interview and literature study. The results show that so really need an action of reformation on regent's formal leadership style as a head of Mamberamo Tengah area for the sake of "good governance" principle materialized in public service and development for local community. This is because in his leadership's style that so prominently is toxic leadership that contradiction with local leadership culture values is Ap kain (Big Man) who is generous.

Copyright © 2023 JEB. All rights reserved.

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Reformasi, kepemimpinan formal, Toksik, pelayanan Publik, Good Governance

Cara Mengutip:

Wanimbo W., Frank S.A.K. (2023). *Reformasi Gaya Kepemimpinan Formal Dalam Pemerintahan di Kabupaten Mamberamo Tengah*. Jurnal Ekologi Birokrasi, 11 (2): 112 - 121.

DOI:

10.31957/jeb.v11i2.3265

ABSTRAK

Artikel ini merupakan hasil penelitian tentang reformasi gaya kepemimpinan formal di Kabupaten Mamberamo Tengah. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan formal dalam konteks (kepala daerah) dan bagaimanakah praktek pelayanan publik dengan asas dan prinsip-prinsip 'good governance' dalam pembangunan bagi masyarakat di Kabupaten Mamberamo Tengah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sangat dibutuhkan suatu langkah reformasi gaya kepemimpinan formal bupati sebagai kepala daerah di Kabupaten Mamberamo Tengah demi terwujudnya prinsip "good governance" dalam pelayanan publik dan pembangunan bagi masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan dalam kepemimpinannya yang sangat menonjol adalah gaya kepemimpinan toksik (toxic leadership) yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan budaya kepemimpinan masyarakat adat yaitu Ap kain (Big Man) pria berwibawa yang memiliki sifat bermurah hati.

Hak Cipta© 2023. JEB. Seluruh Hak Cipta.

1. Pendahuluan

Reformasi atau perubahan secara umum dapat ditunjukkan sebagai suatu langkah upaya untuk perbaikan dari pola atau model lama oleh karena sudah tidak sesuai atau tidak relevan dengan harapan-harapan yang baik baik, sehingga muncul keinginan manusia untuk merubah dan memperbaiki suatu proses dinamika dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan kata lain sebagai proses perubahan dengan sesuatu hal yang baru sebagai akibat dari tuntutan perkembangan zaman. Reformasi secara umum juga bertujuan untuk menata kembali kehidupan suatu bangsa atau negara yang dari keterpurukkannya untuk pemulihan dalam berbagai aspek kehidupan umat manusia. Munculnya gerakan reformasi dapat didorong dari berbagai faktor seperti ekonomi, sosial dan politik, hukum dan hak-hak asasi manusia. Reformasi merupakan susunan tatanan peri kehidupan lama diganti dengan tatanan peri kehidupan secara hukum menuju perbaikan.

Sejak runtuhnya rezim pemerintahan Orde Baru dengan lahirnya reformasi yang dimotori oleh pergerakan mahasiswa di seluruh Indonesia pada tahun 1998, maka dengan semangat reformasi tersebut memberikan dampak positif yang sangat signifikan bagi perubahan dalam segala dimensi kehidupan sosial, ekonomi, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Selain perubahan, dengan semangat reformasi tersebut juga memberikan kebebasan atau kemerdekaan setiap warga negara Indonesia untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam hidup secara individu maupun dalam kelompok organisasi sosial kemasyarakatan lainnya. Untuk memenuhi tuntutan

reformasi yaitu: mewujudkan suatu Indonesia baru, Indonesia yang lebih demokratis, lebih adil, dan lebih sejahtera, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 22 pada tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Tujuannya agar dapat memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, serta meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Tujuan otonomi daerah juga untuk meningkatkan kestabilan politik dan sebagai pelaksana asas desentralisasi. Untuk melaksanakan tujuan itu, daerah diberi wewenang melaksanakan urusan rumah tangga dan perekonomian sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip-prinsip otonomi seluas-luasnya. Dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Sedangkan, manfaat otonomi daerah sebagaimana dalam buku "*Strategi dan Problem Sosial Politik Pemerintahan Otonomi Daerah Indonesia*" oleh Rosramadhana & Simanjuntak (2020) disebutkan ada beberapa manfaat yaitu: a). pelaksanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah yang bersifat heterogen dengan cara menerima inspirasi-inspirasi mereka; b). dengan otonomi daerah, pemerintah daerah lebih leluasa mengendalikan daerahnya dalam pembangunan daerah itu; c). Kebijakan pemerintah akan lebih cocok tujuannya karena lebih tahu karakter manusia di daerah itu sendiri; d). Dapat menarik investor dengan keunikan suatu daerah supaya tidak akan terjadi pemekaran masyarakat tersebut. Oleh karena itu, pada era reformasi dan Otonomi Daerah ini, pemimpin daerah harus lebih peka terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh daerah dan masyarakatnya. Fungsi kepala daerah sebagai lokomotif untuk menggerakkan roda pemerintahan. Karena maju dan tidaknya suatu daerah dan atau berhasil dan tidaknya suatu organisasi selalu ditentukan oleh faktor personal dan cara atau (gaya) kepemimpinan seorang pemimpin itu sendiri.

Gaya kepemimpinan merupakan salah satu unsur fundamental dari pemerintah daerah. Keberhasilan pemerintah daerah mencapai tujuan antara lainnya ditentukan oleh gaya kepemimpinan. Banyak daerah yang kemajuannya kurang maksimal, karena kurang mampu beradaptasi pada situasi-situasi yang terus berubah dan dituntut untuk dapat efektif dan elegan pada perubahan tersebut, tetapi tetap merakyat. Salah satu caranya dengan sering berinteraksi dengan rakyat agar mengetahui aspirasi dan yang menjadi keluhan mereka, kemudian mengadaptasikan pada kebijakan. Gaya kepemimpinan seperti itu sangat dibutuhkan masyarakat. Seperti misalnya, salah satu kepala daerah di Sulawesi Utara yang memiliki gaya kepemimpinana efektif, elegan tetapi tetap merakyat adalah Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambuan. Kedekatan Vonnie dengan masyarakat dapat terlihat dari seringnya Vonnie secara langsung mendatangi masyarakat. Bahkan Vonnie tak segan berbaur dengan masyarakat sampai kalangan bawah. Blusukan ala Vonnie tersebut sudah menjadi warna rutin dari wanita yang juga sangat dekat dengan kaum milenial hingga lansia ini. Tentuanya gaya kepemimpinan seperti itu bermanfaat untuk dapat mengembangkan daerah. Kepala daerah dapat langsung mengetahui situasi sesungguhnya yang dialami masyarakat, tanpa khawatir mendapatkan informasi yang salah. Melalui gaya kepemimpinan elegan, kebijakan yang diambil menjadi lebih efektif dan tentuanya menjadi lebih merakyat. Gaya kepemimpinan tersebut tentuanya dapat mempercepat berbagai target dan rencana pemerintah daerah (Kurniawan, 2020).

Demikian pula dalam bingkai Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua ini, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya secara leluasa bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan hidup bagi warga masyarakat. Otonomi Khusus juga merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk memberikan sentuhan secara khusus dalam program pembangunan agar dapat terjawab kebutuhan dasar bagi warga masyarakat Orang Asli Papua dalam mewujudkan keadilan, penegakkan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan daerah di Provinsi lainnya. Provinsi Papua diberikan Otonomi khusus untuk peningkatan akselerasi pembangunan dan pemberdayaan seluruh rakyat di Papua sesuai prinsip-prinsip otonomi daerah yaitu demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Pemberian kewenangan tersebut diikuti dengan pertimbangan keuangan antara pusat dengan daerah.

Namun perlu ditegaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam konteks disini bukanlah berarti kekuasaan untuk melakukan segala sesuatu yang sewenang-wenang oleh para pemimpin atau kepala daerah tanpa memperdulikan dan /atau menghiraukan keluhan dan kebutuhan masyarakat pada daerahnya. Melainkan kewenangannya wajib dimanfaatkan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan prioritas utama adalah pelayanan publik dan kesejahteraan kepada masyarakatnya itu sendiri. Karena secara kasat mata dan pengalaman empiris di lapangan membuktikan adanya para pemimpin di daerah terutama kepala daerah (para bupati/walikota dan pimpinan DPRD) dalam kepemimpinan mereka sering salah menggunakan kewenangan dan kekuasaan mereka (*abuse of power*) yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik "*Good Governance*", sehingga tugas yang utama yaitu pelayanan publik kepada masyarakat tidak dapat berjalan sesuai dengan prinsi-prinsip otonomi daerah itu sendiri (Sedarmayanti, 2020).

Meskipun Otsus memberikan kewenangan kepada para pemimpin daerah di Provinsi Papua mengurus pemerintahannya untuk menjawab segala persoalan dan atau memperbaiki kesenjangan sosial disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun secara kasat mata dan berdasarkan data empiris di lapangan khususnya di Kabupaten Mamberamo Tengah masih dapat kita jumpai bahwa banyak masyarakat sebenarnya sedang hidup diambang garis kemiskinan. Kondisi kesehatan bagi masyarakat sangat memprihatinkan menyebabkan angka kematian ibu dan anak serta orang dewasa pun semakin meningkat. Bertambahnya jumlah pemuda yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi dibarengi dengan semakin terlantarkannya sejumlah mahasiswa yang kurang mampu dengan biaya pendidikannya yang terkandas sebagai akibat daripada gaya kepemimpinan kepala daerah yang tidak mau tahu (tidak peduli) serta bersikap arogan dan angkuh terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM). Dampaknya para mahasiswa tidak mampu yang seharusnya segera ditolong namun menjadi korban berdampak pada masalah penyelesaian studinya tidak tepat waktu.

Perkembangan data terakhir berdasarkan berita online portal jubi pada tanggal 13 Juni 2021 telah diberitakan bahwa sejumlah mahasiswa asal Kabupaten Mamberamo Tengah yang mengenyam pendidikan di pulau Jawa, Bali berdemonstrasi secara serentak di masing-masing kota studi di antaranya Jakarta, Bandung, Malang,

Kediri, Surabaya, Solo, Semarang, Salatiga dan Bali. Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi menuntut pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah di bawah kepemimpinan Bupati Ricky Ham Pagawak dan Yonas Kenelak agar mencairkan dana pendidikan yang terdiri dari uang pemondokan dan studi akhir, yang belum terealisasikan (You, 2021). Para mahasiswa memprotes tindakan dan gaya kepemimpinan seorang kepala daerah yang selalu membuat janji-janji tetapi tindakannya tidak pernah menepati janjinya. Alasan mendasar mahasiswa memprotes dan mempertanyakan hal ini karena pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah diduga telah menggelapkan dana pendidikan bagi mahasiswa. Kepala daerah dalam gaya kepemimpinannya banyak membagi-bagikan (menghamburkan) uang rakyat Kabupaten Mamberamo Tengah tetapi diberikan kepada warga masyarakat luar di beberapa daerah seperti kabupaten Jayapura, kota Jayapura, Keroom, Supiori, Biak, Yapen, Nabire dan daerah lainnya hanya untuk pencitraan sebagai safari politik menjelang Pilkada Gubernur Serentak Tahun 2024. Sementara masyarakat di Kabupatennya sendiri yaitu Mamberamo Tengah sedang merosot perekonomiannya, dan mahasiswa di beberapa kota studi Indonesia diterlantarkan karena tidak ada sentuhan atau perhatian dari pemerintah daerah.

Adanya fenomena terbaru bahwa Pemerintahan Kabupaten Mamberamo Tengah dalam daftar skor, prestasi dan peringkat antar kabupaten dan kota yang telah diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Otonomi Daerah bagian data validasi dan evaluasi. Berdasarkan data tersebut telah menunjukkan bahwa Kabupaten Mamberamo Tengah berada pada juru kunci atau paling terakhir yaitu urutan ke 29 (dua puluh Sembilan) dengan (skor 0,3306 prestasi sangat rendah) dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Papua. Oleh karena itu, masyarakat sangat membutuhkan reformasi atau suatu perubahan secara serius terhadap gaya kepemimpinannya kepala daerah agar dapat membenahi diri dengan melihat situasi dan kondisi riil masyarakat setempat daripada membagi-bagikan uang diluar dari Kabupaten Mamberamo Tengah yang tidak sesuai dengan sasaran yang tepat. Karena hingga saat ini rakyat sangat membutuhkan sentuhan, kesejahteraan dengan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan, peningkatan standar kesehatan hidup, pelayanan publik dan pembangunan dari pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka gaya kepemimpinan formal dalam pemerintahan di Kabupaten Mamberamo Tengah menjadi daya tarik tersendiri untuk dianalisis dalam suatu penelitian, sehingga gaya kepemimpinan formal diajukan sebagai topik utama dalam penelitian ini. Oleh karena itu, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan formal dalam konteks ini (gaya kepemimpinan kepala daerah), bagaimanakah dalam pemerintahannya dapat melakukan pelayanan publik dengan asas dan prinsip-prinsip 'good governance' dalam pembangunan bagi masyarakat di Kabupaten Mamberamo Tengah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Teknik pengambilan sampel sumber data dipilih secara simple Random Sampling. Dikatakan *simple* (sederhana) karena pengambilan anggota sampel

dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

Data primer dikumpulkan dan menggunakan teknik wawancara langsung kepada beberapa informan, lalu melakukan suatu telaah studi dokumentasi. Observasi partisipan dilakukan pada profil situasi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat yang ada. Sedangkan wawancara mendalam dilakukan pada informan kunci sebagai sumber data yaitu pimpinan lembaga legislatif periode 2009-2014 dan periode 2014-2019, para jabat pemerintahan dan pegawai negeri sipil, swasta, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, unsur pimpinan mahasiswa serta masyarakat di Kabupaten Mamberamo Tengah. Dalam menganalisis data, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan sejak sebelum turun ke lapangan dan sesudah selesai dari lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Tahapan dimulai dari proses reduksi data, display data dan verifikasi data (*verification*).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Gaya Kepemimpinan Formal di Kabupaten Mamberamo Tengah

Dalam gaya kepemimpinan formal saat ini, yang paling menonjol di daerah adalah sikap arogan, otoriter, militeristik dan menerapkan gaya kepemimpinan racun (*Toxic Leadership*). Sebagaimana dinyatakan oleh Marcia Lynn Whicker (1996) dalam bukunya yang berjudul *Toxic leaders: When organization go bad* mengemukakan konsep pemimpin Toksik-Pemimpin Racun (*Toxic Leader*) dan Kepemimpinan racun (*Toxic Leadership*). Kepemimpinan toksik adalah suatu kepemimpinan yang disebabkan oleh pemimpin yang tidak etis, tidak berintegritas dan kepemimpinan yang disfungsi. Wichker dalam Wirawan (2013:433) menyatakan pemimpin toksik pemimpin yang tidak mampu menyesuaikan diri (*maladjusted*), orang yang tidak puas (*malcontent*), berhati dengki (*malevolent*) bahkan jahat (*malicious*). Ia membuli, mengancam, berteriak sehingga menciptakan iklim organisasi yang merusak.

Hal ini ditegaskan erdasarkan hasil wawancara dengan seorang informan BK bahwa Gaya Kepemimpinan Formal di Kabupaten Mamberamo Tengah selama dua periode yang sedang berjalan ini tidak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan sosial dan budaya. Dalam budaya masyarakat setempat lebih dikenal dengan gaya kepemimpinan tradisional atau adat yaitu *Ap kain (Big Man) atau pria berwibawa* yang memiliki sifat *bermurah hati* disebutkan oleh Muhamad Jamin (2014:64) sebagaimana pernah diteliti oleh Mientje De Roombiak (1993:7-9) dan J.R.Mansoben (1995:148; 161) peneliti etnografi dari Uncen lebih dikenal dalam suku Dani umumnya dan khususnya pada suku Lani, Suku Walak, Suku Nggem, Suku Yali dan Suku Taburta yang terdapat di wilayah setempat di Kabupaten Mamberamo Tengah saat ini.

Lebih lanjut, Wirawan (2013:679) menyatakan pula bahwa kepemimpinan toxic (racun) ini banyak dilakukan di negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin dimana budaya pengalagunaan kekuasaan dan kekerasan masih merupakan kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, *toxic leadership* diterapkan oleh sejumlah pemimpin pemerintahan sipil di lembaga pemerintah pusat, di POLRI, Kejaksaan, Pengadilan, DPR, di lembaga pemerintah daerah bahkan di pemerintah desa. Bentuk perilaku kepemimpinan racun tersebut antara lain: korupsi, kolusi dan nepotisme; penyalahgunaan kekuasaan; menekan bawahan; kekerasan dan pembunuhan dan melakukan pelecehan.

Adanya suatu fakta empiris tentang gaya kepemimpinan toksik (racun) ini yang sedang diterapkan secara otoriter dan militeristik dalam kepemimpinan formal di Kabupaten Mamberamo Tengah. Menjadi suatu ciri khas gaya kepemimpinan formal hanya selalu berdasarkan “Peraturan Bupati” karena belum pernah dibuat suatu “peraturan daerah”. Misalnya peraturan Bupati tentang semua absensi pegawai bagi seluruh ASN diawasi atau dikendalikan oleh anggota keamanan dari polisi (Satuan BRIMOB) dengan pendekatan militeristik. Akibatnya menyebabkan para pegawai sangat tertekan secara mental dan psikis saat ini. Padahal sewajarnya kepala daerah dapat melakukan absensi pegawai bisa dipercayakan langsung kepada masing-masing kepala dinas, badan dan kantor agar dapat mengecek para pegawainya.

Namun entah mengapa, Bupati memerintahkan anggota keamanan dari Satuan Brimob Polda Papua BKO di Kabupaten Mamberamo Tengah yang mengontrol atau mengawasi absensi para pegawai negeri sipil. Padahal situasi KamtibMas sangat aman dan kondusif di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Mamberamo Tengah. Jadi absensi bagi para Pegawai Negeri Sipil dikontrol oleh anggota keamanan (polisi) dari Satuan Brimob sejak pukul 08.00 sampai dengan pukul 11:00 siang kemudian lebih lucunya lagi anggota satuan Brimob melaksanakan tugas absensi kepada semua pegawai negeri sipil bertempat bukan kantor tetapi di kantin Pemda. Tidak ada hubungan yang melekat dari Satuan anggota polisi (Brimob) mengabsensi para pegawai negeri sipil di daerah karena dua institusi yang berbeda. Fungsi dan tugas pokok bagi anggota Polri dari kesatuan Brimob adalah tentunya sangat berkaitan dengan Kantibmas, bukan mengurus absensi Pegawai Negeri Sipil apalagi di kantin yang diluar dari lingkungan kantor. Apabila dari pihak PNS yang mencoba berani menentang atau memprotes kebijakan ini, maka bupati selalu memerintahkan pihak keamanan dari Satuan Brigade Mobil (BRIMOB) untuk menangkap dan ditindak tegas dengan cara (dipukul, diintimidasi, diteror) agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Salah seorang pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Mamberamo Tengah dalam suatu wawancara menegaskan bahwa, dalam gaya kepemimpinan formalnya terjadi tindakan-tindakan diskriminatif, koruptif, kolusif dan nepotisme dalam menempatkan pegawainya, serta melakukan intervensi yang sewenang-wenang dalam urusan lembaga keagamaan yang bukan menjadi tanggungjawabnya. Namun hanya sebagai tameng untuk melindungi dirinya dari perbuatan dan strategi politik yang sangat kotor supaya masyarakat tetap mengakui sebagai pemimpin yang religious. Padahal, khalayak publik sudah menilai banyak tindakan dalam mengambil keputusan atau kebijakan bertentangan dengan peraturan dan kehendak masyarakat.

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh tokoh agama, ada kesan yang tumbuh bahwa pemimpin memanfaatkan gereja sebagai tempat melindungi diri supaya publik dapat membaca atau menilai dirinya sebagai seorang agamais dan seorang religious. Padahal perilaku hidupnya tidak mencerminkan seorang yang religious atau rohaniawan yang saleh. Oleh karena itu, mencampuri urusan dalam pelayanan gereja hanya sebagai pencitraan saja untuk mencari simpatik dan dukungan-dukungan politis saja. Pernyataan lain dari pengusaha orang asli Papua di daerah juga mengungkapkan bahwa dalam gaya kepemimpinan formal, tidak bisa memberdayakan dan tidak memberikan kesempatan yang leluasa bagi anak-anak asli daerah agar dapat mengembangkan usahanya untuk lebih maju dan mandiri. Gaya kepemimpinan model ini adalah sikap pemimpin yang salah menggunakan kekuasaannya (*abuse of power*) hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya atau bisa dapat dikatakan sebagai strategi untuk melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme) secara terang benderang.tindakan memperkaya diri sendiri.

Demikian pula pernyataan dari beberapa mahasiswa mengungkapkan hal yang sama tentang gaya kepemimpinan formal seorang kepala daerah dalam menangani persoalan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Mamberamo Tengah menyatakan bahwa:

“Dalam Kepemimpinan Bupati Dan Wakil Bupati saat ini tidak adanya bantuan studi akhir dan biaya pemondokan asrama bagi mahasiswa asal Kabupaten Mamberamo Tengah pada beberapa kota studi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 13 Juni 2021 seluruh mahasiswa asal Kabupaten Mamberamo Tengah pada beberapa kota studi di Indonesia melakukan demonstrasi menuntut kepada pemerintah daerah dibawah kepemimpinan RHam Pagawak,SH.,M.Si untuk membayarkan biaya studi akhir dan pemondokan kepada mahasiswa. Sikap acuh tak acuh dan arogan serta otoriter, sehingga nasib sebagian besar mahasiswa diterlantarkan. Tidak adanya Akuntabilitas, tidak adanya partisipasi dari masyarakat, tidak adanya transparency, tidak efektif dan efisien. Kami mahasiswa sangat kecewa model pemimpinnya. (Wawancara 15 Juni 2021 jam 20.00)

Pernyataan dari Tokoh Pemuda yang menganalisis gaya kepemimpinan formal dalam memimpin masyarakat di Kabupaten Mamberamo Tengah menyatakan bahwa:

“Di wilayah kabupaten Mamberamo Tengah terdapat banyak anak-anak muda atau pemuda berpotensi, baik itu potensi dalam olah raga, music, politik dan lain-lain. Namun semenjak terpilihnya seorang kepala daerah ini, jarang bahkan tidak pernah memberdayakan pemuda berpotensi tersebut untuk mengembangkan diri mereka. Tidak adanya partisipasi masyarakat dalam segala proses perencanaan program pembangunan karena memang tidak pernah melibatkan masyarakat (baik dari tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda). Dalam kepemimpinannya dia adalah seorang yang paling “angkuh/sombong dan sangat otoriter” sehingga tidak pernah menerima masukan atau saran pendapat dari orang lain. Dia selalu memotong-motong pembicaraan orang lain dengan membentak-bentak, sok-sok pintar dan selalu merasa dirinya yang paling pintar/pandai daripada orang lain” (Wawancara dengan LW dan EP, pada hari Jumat 18 Juni 2021 jam 15.00 – 17.00)

Berdasarkan hasil penelitian, para informan memiliki kesamaan dalam memberikan penilaian terhadap kepala daerah saat ini yang cenderung menerapkan gaya kepemimpinan yang otoriter. Hal ini beralih pada lemahnya dukungan pada lingkaran inti pemerintahan, maupun masa depan kebijakan yang dilaksanakan di masa mendatang yang mungkin akan mengalami kendala.

3.2. Model Kepemimpinan Melayani

Penelitian kepemimpinan ini dapat dijadikan landasan yang lebih kuat pada gagasan teoritis mengenai perilaku antarpribadi kepala daerah. Hampir semua definisi kepemimpinan menyebut kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi orang lain (Vroom & Jago, 2007). Artinya, mempengaruhi orang lain mengandaikan interaksi interpersonal antara pemimpin dan yang dipimpin. Selain itu, sebagian besar item dalam hasil penelitian kepemimpinan berfokus pada perilaku antarpribadi pemimpin dalam kaitannya dengan bawahannya. Penelitian ini dengan demikian memiliki

korelasi dengan penelitian lain yang mengutamakan perhatian interaksi kepribadian. Saat ini, terdapat konsensus luas di kalangan ilmuwan bahwa interaksi interpersonal (yaitu, perilaku antara dua orang) paling baik diringkas dalam dua dimensi utama, yang disebut perkumpulan dan kendali atau dominasi (Wiggins, 2003).

Sisi negatif atau sisi gelap kepemimpinan juga semakin intensif dikaji saat ini sebagaimana temuan dalam penelitian ini selaras dengan ungkapan De Hoogh & Den Hartog (2008) yang memaparkan bentuk kepemimpinan despotik, yang digambarkan berdasarkan pada dominasi pribadi dan perilaku otoriter yang melayani kepentingan pribadi pemimpin. Lebih lanjut menurut De Hoogh & Den Hartog (2008) menggambarkan gaya kepemimpinan, “berbagi kekuasaan”, sebagai kebalikan dari kepemimpinan despotik. Gaya kepemimpinan ini, yang merupakan bagian dari skala kepemimpinan yang disebut kepemimpinan etis, direpresentasikan oleh gaya-gaya yang dekat dengan kutub positif poros kelompok.

Dengan demikian penelitian ini mengusulkan perlunya pendekatan gagasan lain yang relatif baru, namun banyak dibicarakan tentang kepemimpinan, yakni “kepemimpinan yang melayani”. Pemimpin yang melayani menempatkan kepentingan, kebutuhan, dan aspirasi orang lain di atas kepentingannya sendiri. Pilihan pemimpin yang melayani adalah melayani terlebih dahulu atau sebagai prioritas. Pemimpin yang melayani merasa bertanggung jawab secara moral tidak hanya untuk hasil organisasi, tetapi juga untuk bawahannya (Ehrhart, 2004). Strategi untuk mencapai model kepemimpinan yang melayani dapat dilakukan melalui komunikasi dua arah dengan multiaktor yang di lingkaran seorang pemimpin, yang bertujuan akhir pada pemenuhan kebutuhan masyarakat.

4. Kesimpulan

Gaya kepemimpinan formal di Kabupaten Mamberamo Tengah yang paling menonjol adalah kepemimpinan toksik (racun), militeristik dan otoriter menimbulkan kematian secara mental dan psikis terhadap pegawai negeri sipil dan masyarakatnya. Hal lainnya yang terjadi adalah tidak bijaksana dalam menerapkan kekuasaan dan berjiwa feodal atau menjadi pemimpin kapitalis birokrat serta hipokrit atau munafik dalam perkataan dan tindakannya, sehingga tidak bisa dipercaya oleh sebagian besar masyarakat. Dengan melihat fenomena ini, maka sangat dibutuhkan reformasi gaya kepemimpinan yang cocok dalam kepemimpinan demokratis atau disesuaikan dengan kondisi dan situasi budaya masyarakat setempat. Selain itu, perlu juga menerapkan asas dan prinsip pemerintahan yang baik “*good governance*” supaya masyarakat dapat merasakan keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, kepastian hukum, pemerataan dan pelayanan publik yang baik.

Daftar Pustaka

- De Hoogh, A. H., & Den Hartog, D. N. (2008). Ethical and despotic leadership, relationships with leader's social responsibility, top management team effectiveness and subordinates' optimism: A multi-method study. *The leadership quarterly*, 19(3), 297-311.
- Ehrhart, M. G. (2004). Leadership and procedural justice climate as antecedents of unit-level organizational citizenship behavior. *Personnel psychology*, 57(1), 61-94.

- Jamin, M (2014) *Peradilan Adat Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kurniawan, T. (2020). Gaya kepemimpinan pengaruhi kemajuan daerah. Available at: <https://www.alinea.id/politik/gaya-kepmimpinan-pengaruhi-kemajuan-daerah-b1Zi9sWV> , diakses pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020.
- Mansoben, J.R (1995) *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya*, Leiden: LIPI-RIJKS Universitas Leiden
- Roemiak, M.D (1993) *Etnografi Irian Jaya. Panduan Sosial Budaya*. Buku satu Kelompok Peneliti Etnografi Irian Jaya
- Rosramadhana & Simanjuntak (2020). *Segala hal tentang otonomi daerah hingga manfaatnya*. Available at: <https://news.detik.com/berita/d-5252030/segala-hal-tentang-otonomi-daerah-hingga-manfaatnya>, diakses pada hari kamis, tanggal 12 Juli 2023.
- Sedarmayanti, S. (2020). Membangun sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 7(2), 1-16.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 22 pada tahun 1999 tentang pemerintah daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
- Vroom, V. H., & Jago, A. G, (2007). The role of the situation in leadership. *American psychologist*, 62(1), 17.
- Wiggins, J. S. (2003). *Paradigms of personality assessment*. Guilford Press.
- Wirawan, (2013) *Kepemimpinan. Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian. Contoh aplikasi untuk Kepemimpinan Wanita, Organisasi Bisnis, Pendidikan, Militer dan kepemimpinan racun pemerintahan sipil*
- You, A. (2021). *Dana pendidikan tak kunjung cair, mahasiswa Mamteng se-Jawa dan Bali demo*. Avaliabe at: <https://jubi.co.id/dana-pendidikan-tak-kunjung-cair-mahasiswa-mamteng-se-jawa-dan - bali-demo/> diakses pada tanggal 15 Juni 2021.